



SINGKAWANG PEMERINTAH
KOTA

2024 LAPORAN MONEV RENCANA AKSI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Singkawang

KATA PENGANTAR

Laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja tahun 2024 ini dibuat sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan evaluasi dan monitoring rencana aksi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2024 merupakan informasi indikator dan target kinerja dalam pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Laporan evaluasi dan monitoring rencana aksi kinerja selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 juga dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2024.

Singkawang, 31 Desember 2024

Kepala

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Singkawang



Drs ZULHIAR

NIP. 19681223 1989081 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu bentuk mewujudkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah dengan menyusun rencana aksi Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk rencana aksi kinerja sasaran. membuat action plan atau rencana aksi adalah langkah awal yang harus dilakukan jika kita ingin melakukan perubahan.

Rencana Aksi sangat penting dibuat di awal karena dari situlah kita dapat menganalisa berbagai *goal* atau tujuan utama yang menjawab *problem statement*, objektif, aktivitas, hingga eksekusi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan terkait perubahan yang akan kita lakukan. Dari rencana aksi pula, kita akan memiliki arah yang jelas atas awal dan akhir perubahan tersebut. rencana aksi juga bisa merepresentasikan proses perubahan yang dinamis, jika diperlukan kita juga dapat mengakomodasi perubahan saat informasi baru muncul. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa dokumen rencana aksi berperan penting untuk mengeksekusi sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dan juga diperlukannya evaluasi terhadap rencana aksi yang telah dilaksanakan tersebut sebagai tolak ukur dan perbaikan untuk rencana selanjutnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor : 061/499/Setda.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:

a. Tugas :

Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

b. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, dan politik;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di

wilayah;

3. Pengoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
4. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
6. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sesuai dengan Rencana Kerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2024 mendapat alokasi anggaran APBD sebesar:

No	Uraian	Anggaran
1	Belanja Operasi	25.443.269.927
2	Belanja Modal	148,223,915
	Jumlah Total Anggaran (Setelah Perubahan)	25.591493.842

Anggaran tersebut di atas untuk melaksanakan 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan yang terbagi kedalam 1 (satu) Sasaran Utama dan 2 (dua) Sasaran Pendukung. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dalam kurun waktu Tahun 2023-2026 adalah ***"Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Hondurasif, Toleran Dan Berbudaya"***, dan sebagai indikator dalam pencapaian tujuan tersebut maka ditetapkan indikator tujuan yaitu ***"Angka Kejadian Konflik Sosial"***.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diiformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu empat tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas

dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Untuk mewujudkan tujuan diatas maka ditetapkan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut ***“Meningkatnya Wawasan Nusantara”*** dengan indikator sasaran ***“Persentase Aspek Pancagatra atau Aspek Wawasan Nusantara”***.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud Dan Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup	3
BAB II GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN	
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	4
B. Rencana Strategis.....	6
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	9
D. Pencapaian Rencana Aksi Tahun 2024.....	11
BAB III EVALUASI CAPAIAN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024	
A. Evaluasi Capaian Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024	16
BAB IV PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang di laksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus mampu menjamin bahwa kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Secara nasional, pemerintah merupakan induk dalam proses pembangunan yang harus membuat pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) periode 20 tahun, sebagai capaian pembangunan yang disepakati oleh legislatif dan eksekutif serta seluruh stakeholder yang terlibat pada skala nasional.

Selanjutnya RPJP tersebut diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 5 tahun yang menjadi pedoman pemerintah daerah untuk mendukung RPJMN tersebut dalam wadah RPJP dan RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota sampai pada perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk mengaplikasikan visi dan misi rencana pembangunan daerah.

Penjabaran RPJMD dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program antara RPJMD dengan RKPD harus konsisten, sehingga dapat tercapai sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Untuk memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan dan Tolak ukur Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Daerah, maka sesuai dengan Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun Rencana Aksi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2024.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Monitoring Rencana Aksi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2024 merupakan implementasi ketentuan peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan dan evaluasi rencana aksi kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Singkawang Tahun 2024 adalah sebagai bentuk akuntabilitas Penyelenggaraan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 dan Tolok Ukur pencapaian target sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2024.

Tujuan penyusunan laporan evaluasi dan monitoring rencana aksi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2024 Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kerja yang telah dibuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Singkawang Tahun 2024;
2. Sebagai upaya percepatan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota singkawang untuk meningkatkan kinerja capaian sasaran yang diamanatkan dalam RPD.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup laporan evaluasi dan monitoring rencana aksi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2024 meliputi sasaran strategis, indikator target kinerja tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Revisi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

a. Tugas:

Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

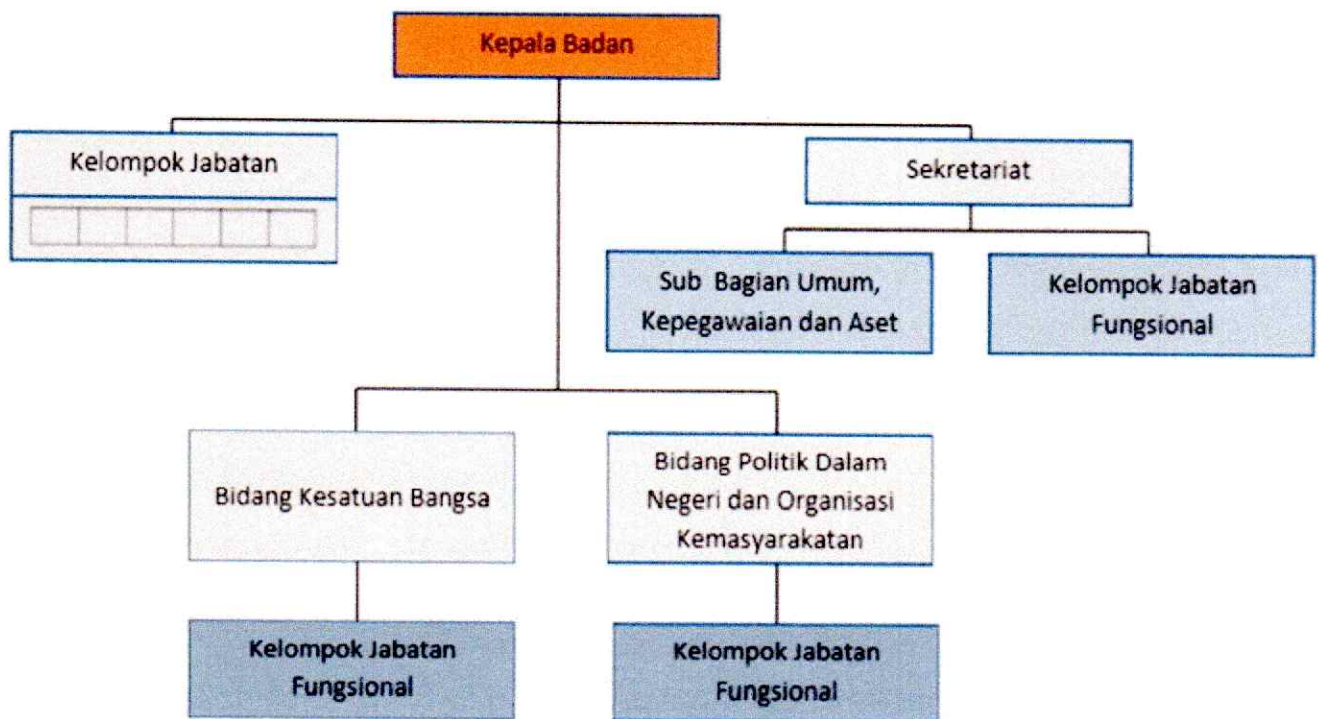
b. Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, dan politik;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
3. Pengoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
4. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
6. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor : 061/499/Setda.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang. Adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2024



Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari 2 subbagian yaitu :
 - Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Kelompok Jabatan Fungsional

B. RENCANA STRATEGIS

Memasuki Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang menggunakan dasar pelaksanaan kegiatan dengan acuan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat daerah (Renstra PD). Rancangan awal Revisi Renstra yang telah tersusun dengan mempertimbangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Forum Perangkat Daerah tersebut kemudian, dijadikan dasar untuk menyusun Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang. Kepala Perangkat Daerah kemudian menyampaikan Rancangan tersebut kepada Bappeda untuk diverifikasi guna melihat kesesuaiannya dengan Rancangan Akhir RPD. Hasil verifikasi dipergunakan untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang. Rancangan Akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan dengan Perkada.

Revisi Rencana Strategis (Revisi Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.1 Tujuan Sasaran Setrategi Beserta Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dalam kurun waktu tahun 2023-2026 adalah ***“Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Hondusif, Toleran Dan Berbudaya”***, dan

sebagai indikator dalam pencapaian tujuan tersebut maka ditetapkan indikator tujuan yaitu **"Angka Kejadian Konflik Sosial"**.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diiformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu empat tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Untuk mewujudkan tujuan diatas maka ditetapkan sasaran janka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut **"Meningkatnya Wawasan Nusantara"** dengan indikator sasaran **"Persentase Aspek Pancagatra atau Aspek Wawasan Nusantara"**.

**Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Perubahan RPD
Kota Singkawang Tahun 2023-2026**

Tujuan RPD Pemerintah Kota Singkawang	:	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi		
Sasaran	:	Indeks Toleransi		
Tujuan Badan Kesbangpol		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkanya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis kondusif, toleran dan berbudaya		Meningkatnya wawasan nusantara	Peningkatan ideologi dan wawasan kebangsaan	Meningkatkan eduksi pancasila dan cinta tanah air serta wawasan kebangsaan bagi pelajar dan masyarakat

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diupayakan dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan.

Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya wawasan nusantara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
		Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Adminitrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Program Peningkatan Peran Partai Politik, Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pilkada serta Pemantauan Situasi Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Singkawang yang merupakan penjabaran operasional Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu Tahun 2023 – 2026.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang

Sasaran	Indikator	Formulasi	Penjelasan	Target Kinerja			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya wawasan nusantara	Persentase terlaksananya aspek panca gatra	$\frac{\text{Jumlah Persentase 5 Program}}{5 \text{ Aspek Pancagatra}} \times 100\%$	Penerapan 5 (Lima) Aspek Panca Gatra (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan	5 Apek (100%)	5 Aspek (100%)	5 Aspek (100%)	5 Aspek (100%)

Sasaran	Indikator	Formulasi	Penjelasan	Target Kinerja			
				2023	2024	2025	2026
			Pertahanan Keamanan) dengan tipe pengukuran kumulatif				

Aspek pancagatra terdiri dari ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal ini mengedepankan penerapan pancagatra dalam rangka pencapaian indikator tujuan pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Singkawang yaitu indeks toleransi. Berikut ini penjelasan dari aspek pancagatra antara lain:

1. Ideologi

Ideologi merupakan aspek pertama dalam pancagatra yang memuat sebuah aturan atau nilai yang dianut oleh sebuah negara. Tujuan adanya ideologi adalah untuk mencapai kesetaraan serta kesejahteraan rakyat bersama di masa yang akan datang. Adapun ideologi yang diterapkan di Indonesia adalah ideologi Pancasila. Kinerja Ideologi terletak pada Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.

2. Politik

Politik berarti asas dan kebijakan dalam pemerintahan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Kinerja Politik yang pada Program Peningkatan Peran Partai Politik, Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dan Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

3. Ekonomi

Sedangkan ekonomi merupakan aspek yang berperan dalam hal penyediaan dan pendistribusian kebutuhan warga negara. Kegiatan perekonomian menjadi kekuatan nasional di negara yang bersakutan. Kinerja ekonomi terletak pada Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

4. Sosial budaya

Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi ketekunan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan (ATHG). Sedangkan kinerja Sosial Budaya terletak pada Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya. Pertahanan dan keamanan termasuk ke dalam aspek pancagatra, di mana suatu negara memiliki pertahanan yang baik sehingga bisa membuat masyarakat hidup makmur. Pertahanan dan keamanan merupakan

ketangguhan yang mendukung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang dapat membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kinerja Pertahanan dan Keamanan bisa di lihat dalam Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

D. PENCAPAIAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu 15 menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini:

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya wawasan nusantara	Persentase terlaksananya aspek panca gatra	%	100	100	100

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya mempunyai satu sasaran strategis seperti yang terlihat dalam tabel di atas. Dari tabel di atas, terdapat satu sasaran dan satu

Indikator kinerja. Pada Tahun 2024, indikator kinerja untuk sasaran ini telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Dalam hal ini terdapat analisis efisiensi penggunaan sumber daya, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran berdasarkan pohon kinerja sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	Anggaran		Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya wawasan nusantara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25,591,493,842.00	25,431,020,400.00	100%	160,473,442.00
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan				
		Program Peningkatan Peran Partai Politik, Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat				
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan				

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	Anggaran		Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
		Ekonomi, Sosial Dan Budaya				
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial				

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa sasaran strategis “Meningkatnya Wawasan Nusantara” dengan capaian kinerja adalah 100% dan tingkat efisiensi anggaran sebesar Rp. 160,473,442.00.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Dengan indikator program persentase pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan tercapai 100% dari target 100%. Adapun formula indikatornya adalah jumlah peserta yang meningkat pemahamannya dibagi jumlah peserta dikali 100%. Pada tahun 2024 ini jumlah peserta yang ditingkatkan pemahamannya dan menjalani post test sebanyak 173 orang, sedangkan yang meningkat pemahamannya sebanyak 114. Maka perhitungannya $(114/173) \times 100\% = 81,48\%$ jadi capaian kinerjanya adalah 100%. Hal ini dapat tercapai karena antusiasme masyarakat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan dan kinerja SDM yang baik dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan Ideologi Pancasila. Adapun faktor penghambatnya yaitu pelaksanaan kegiatan masih bersifat klasikal sehingga beberapa peserta terutama generasi muda sulit untuk memahami materi.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini, yaitu persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik lembaga yang mendapatkan pendidikan politik. Untuk indikator pertama formulanya adalah rata-rata Jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT Pilkada/Pileg/Pilpres yang menggunakan hak pilih dibagi rata-rata Jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT dikalikan 100%. Dari target 100% telah tercapai 74,52% atau 100% dari target. Hal ini merupakan data numerik dari KPU Kota Singkawang.

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Singkawang, yang diformulasikan dengan jumlah organisasi yang teregister dan terdaftar di Kota Singkawang dibagi jumlah organisasi yang terdata di Kota Singkawang dikalikan 100%. Pada tahun 2024 ini jumlah ormas yang terdata di Badan Kesbangpol sejumlah 165 dan yang terdata dan teregister sebanyak 142. Sehingga didapatkan $(142 / 165) \times 100\% = 86,06\%$ atau 100% dari target 100%. Target program ini dapat tercapai karena adanya antusiasme ormas dalam mendaftarkan organisasinya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya

Ada indikator untuk mengukur keberhasilan dari program ini, yang pertama yaitu Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dengan formula Jumlah peserta yang memahami pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dibagi penyelenggaraan pembinaan ketahanan ekonomi sosial dan budaya di kali 100%. Sehingga di dapatkan $(50\text{peserta}/50\text{peserta}) \times 100\% : 100\%$ bahwa capaian kinerjanya 100%. Beberapa kendala yang menghambat proses tercapainya target tersebut antara lain masih terbatasnya kemampuan pembinaan serta pemantauan langsung.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Indikator untuk mengukur ketercapaian program ini adalah persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi wilayah, dari yang ditargetkan 100% dapat tercapai 100%. Untuk formulasi perhitungan didapatkan dari jumlah konflik sosial yang tertangani dibagi dengan jumlah konflik sosial yang terjadi. Tahun 2024 ini tercatat tidak ada konflik, Hal ini didukung oleh kerjasama dari berbagai pihak seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FORKOPIMDA dan juga dukungan dari masyarakat itu sendiri. Dalam pencapaian target program ini, masih terdapat

kendala seperti masih rendahnya pengentryan laporan setiap potensi konflik/ konflik yang terjadi di wilayah, dikarenakan keterbatasan dari petugas entry data. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Badan Kesbangpol menyelenggarakan bimtek kewaspadaan dini bagi para aparatur kecamatan dan kelurahan.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

No	Sasaran	Indikator	Formula (%)	Target Kinerja Pada Tahun 2023	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Angka Potensi Kejadian Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah Angka Konflik Tahun } N - 1}{\text{Jumlah Konflik Tahun } N} \times 100\%$	5	0	0%
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih	$\frac{\text{Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100\%$	-	0	Tidak ada capaian kinejanya karena tahun 2023 bukan tahun pemilu
3	Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Ormas Aktif Terdaftar	$\frac{\text{Jumlah Ormas Aktif yang dibina}}{\text{Jumlah Total Ormas Terdaftar}} \times 100\%$	70%	50,38%	67,17%

Dalam hal ini tidak bisa di bandingkan antara capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 di karenakan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2024.

BAB III

EVALUASI CAPAIAN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024

A. EVALUASI CAPAIAN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 25.591.493.842,00 dengan realisasi sebesar Rp. 25.431.020.400,00 dari jumlah yang dianggarkan atau sebesar 99,37%. guna membiayai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,061,756,181.00	2,947,267,769.00	96.26%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,797,380.00	25,817,100.00	92.88%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,736,340.00	4,449,300.00	93.94%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	994,740.00	620,400.00	62.37%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	782,340.00	495,300.00	63.31%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,043,120.00	660,400.00	63.31%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	771,720.00	505,300.00	65.48%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19,469,120.00	19,086,400.00	98.03%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,273,523,947.00	2,189,621,472.00	96.31%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,181,441,907.00	2,101,954,472.00	96.36%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	86,010,000.00	81,720,000.00	95.01%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,072,040.00	5,947,000.00	97.94%

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	409,183,660.00	393,837,277.00	96.25%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,341,170.00	2,742,500.00	82.08%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76,714,950.00	69,542,500.00	90.65%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,835,000.00	3,835,000.00	100.00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,600,020.00	6,984,000.00	65.89%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,223,320.00	4,319,000.00	69.40%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,469,200.00	2,340,000.00	67.45%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,000,000.00	4,900,000.00	98.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300,000,000.00	299,174,277.00	99.72%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147,660,465.00	146,200,000.00	99.01%
Pengadaan Mebel	18,658,380.00	18,400,000.00	98.62%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129,002,085.00	127,800,000.00	99.07%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153,100,730.00	141,651,960.00	92.52%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	826,560.00	780,000.00	94.37%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77,640,000.00	71,567,010.00	92.18%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74,634,170.00	69,304,950.00	92.86%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50,490,000.00	50,139,900.00	99.31%

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41,150,000.00	40,969,900.00	99.56%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,340,000.00	9,170,000.00	98.18%

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	912,174,208.00	887,339,100.00	97.28%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	912,174,208.00	887,339,100.00	97.28%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	882,174,208.00	857,339,100.00	97.18%
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	21,433,371,185.00	21,426,110,951.00	99.97%

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	21,433,571,186.00	21,426,110,991.00	99.97%
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	21,167,194,986.00	21,167,190,991.00	100.00%
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	157,157,680.00	153,100,000.00	97.42%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	109,218,520.00	105,820,000.00	96.89%

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	62,000,000.00	62,000,000.00	100.00%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	62,000,000.00	62,000,000.00	100.00%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	62,000,000.00	62,000,000.00	100.00%

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	111,992,266.00	98,302,600.00	87.76%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	111,992,266.00	98,302,600.00	87.78%
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14,128,048.00	8,177,000.00	57.88%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50,234,908.00	47,731,600.00	95.02%
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	47,629,310.00	42,394,000.00	89.01%

LAPORAN RENCANA AKSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKWANG
TAHUN 2024

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Target PAGU	Realisasi PAGU	Persentase PAGU	TW		Sasaran Kegiatan	Aktivitas	Kendala	Solusi	Penanggung Jawab
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100%	Rp 4.736.340	Rp 4.449.300	94%	TW I	✓	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menyediakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tidak ada	-	Sekretariat
										TW II	✓					
										TW III	✓					
										TW IV	✓					
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%	Rp 994.740	Rp 620.400	63%	TW I	✓	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Menyediakan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	tidak ada	-	Sekretariat
										TW II	✓					
										TW III	✓					
										TW IV	✓					
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%	Rp 782.340	Rp 660.400	85%	TW I	✓	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Menyediakan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	tidak ada	-	Sekretariat
										TW II	✓					
										TW III	✓					
										TW IV	✓					
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100%	Rp 1.043.120	Rp 660.400	64%	TW I	✓	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Menyediakan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tidak ada	-	Sekretariat
										TW II	✓					
										TW III	✓					
										TW IV	✓					

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Target PAGU	Realisasi PAGU	Persentase PAGU	TW		Sasaran Kegiatan	Aktivitas	Kendala	Solusi	Penanggung Jawab
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	1	1	100%	Rp 771.720	Rp 505.300	66%	TW I	✓	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tidak ada		Sekretari
										TW II	✓					
										TW III	✓					
										TW IV	✓					
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100%	Rp 19.469.120	Rp 19.086.400	98%	TW I	✓	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Menyediakan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tidak ada		Sekretari
										TW II	✓					
										TW III	✓					
										TW IV	✓					
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	21	21	100%	Rp 2.181.441.907	Rp 2.101.666.751	97%	TW I	✓	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Menyediakan gaji dan tunjangan ASN	Tidak ada		Sekretari
										TW II	✓					
										TW III	✓					
										TW IV	✓					
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4	100%	Rp 86.010.000	Rp 81.720.000	96%	TW I	✓	Tersedianya dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Membuat dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tidak ada		Sekretari
										TW II	✓					
										TW III	✓					
										TW IV	✓					
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100%	Rp 6.072.040	Rp 5.947.000	98%	TW I	✓	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Membuat Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tidak ada		Sekretari
										TW II	✓					
										TW III	✓					

No	Sao Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Kemampuan	Persentase	Target PAGU	Kemampuan PAGU	PAGU	TW	Sasaran Kegiatan	Aktivitas	Anggaran	Status	Jawab
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1		90%				TW I TW II TW III TW IV					Sekretaris
11	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1		90%				TW I TW II TW III TW IV	Tersedia Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				Sekretaris
12	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1		90%				TW I TW II TW III TW IV					
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%	Rp.3.341.170	Rp.2.742.500	85%	TW I TW II TW III TW IV	tersedia Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	menyediakan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tidak ada		Sekretaris
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%	Rp.76.711.950	Rp.69.542.500	91%	TW I TW II TW III TW IV	Tersedia Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	menyediakan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tidak ada		Sekretaris
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Paket	1	1	100%	Rp.3.835.000	Rp.3.835.000	100%	TW I	Tersedia Paket Peralatan Rumah Tangga	Menyediakan Paket Peralatan Rumah	tidak ada		Sekretaris

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Target PACU	Realisasi PACU	Persentase PACU	TW		Sasaran Kegiatan	Aktivitas	Kendala	Solusi	Pre
										TW II	✓					
										TW III	✓					
										TW IV	✓					
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100%	Rp.10.600.020	Rp.6.984.000	66%	TW I	✓	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Menyediakan Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	tidak ada		Se
										TW II	✓					
										TW III	✓					
										TW IV	✓					
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	100%	Rp.6.223.320	Rp.4.319.000	70%	TW I	✓	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan Disediakan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan Disediakan	tidak ada		Se
										TW II	✓					
										TW III	✓					
										TW IV	✓					
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	36	36	100%	Rp.3.469.200	Rp.2.340.000	68%	TW I	✓	tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Menyediakan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	tidak ada		Se
										TW II	✓					
										TW III	✓					
										TW IV	✓					
19	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100%	Rp.5.000.000	Rp.4.900.000	98%	TW I	✓	Tersedianya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Menyediakan Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	tidak ada		Se
										TW II	✓					
										TW III	✓					
										TW IV	✓					
20	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100%	Rp.300.000.000	Rp.299.174.237	99%	TW I	✓	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Membuat Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tidak ada		Se
										TW II	✓					
										TW III	✓					

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Target PAGU	Realisasi PAGU	Persentase PAGU	TW		Sasaran Kegiatan	Aktivitas	Kendala	Solusi	Penang. Jaw.
										TW IV	✓					
21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1		0%				TW I						
										TW II						
										TW III						
										TW IV						
22	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	2	100%	Rp.18.638.380	Rp.18.400.000	99%	TW I	✓	Tersedianya Paket Mebel yang Disediakan	Menyediakan Paket Mebel yang Disediakan	tidak ada		Sekretaris
										TW II	✓					
										TW III	✓					
										TW IV	✓					
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	100%	Rp.129.002.085	Rp.127.800.000	100%	TW I	✓	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Menyediakan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	tidak ada		Sekretaris
										TW II	✓					
										TW III	✓					
										TW IV	✓					
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							TW I						
										TW II						
										TW III						
										TW IV						
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2	100%	Rp.826.560	Rp.780.000	99%	TW I	✓	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tidak ada		Sekretaris
										TW II	✓					
										TW III	✓					
										TW IV	✓					
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100%	Rp.77.659.000	Rp.54.087.202	79%	TW I	✓	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Menyediakan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	tidak ada		Sekretaris

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Penyisihan	Target PACU	Realisasi PACU	Penyisihan PACU	TW	Sasaran Kegiatan	Aktivitas	Kendala	Substansi	Pemangku Jarak
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kamar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kamar yang Dipekikan	Laporan	12	12	100%	Rp 14.634.170	Rp 69.304.934	100%	TW I II III IV	Menyediakan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kamar yang Dipekikan	Menyediakan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kamar yang Dipekikan	tidak ada	Sekarang	
28	Penyediaan Jasa Penyediaan Ruang Operasional atau Lapangan yang Dipekikan dan diberikan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipekikan dan diberikan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	100%	Rp 11.190.000	Rp 40.960.906	100%	TW I II III IV	Menyediakan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipekikan dan diberikan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipekikan dan diberikan Pajak dan Perizinannya	tidak ada	Sekarang	
29	Penyediaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya yang Dipekikan	Unit	14	14	100%	Rp 9.140.000	Rp 9.170.000	100%	TW I II III IV	Menyediakan Perakitan dan Mesin Lainnya yang Dipekikan	Menyediakan Perakitan dan Mesin Lainnya yang Dipekikan	tidak ada	Sekarang	
30	Penyediaan Kebutuhan Cerdang Kamar dan Bangunan Lainnya	Jumlah Cerdang Kamar dan Bangunan Lainnya yang Dipekikan	Unit	1	1	100%			100%	TW I II III IV	Menyediakan Cerdang Kamar dan Bangunan Lainnya yang Dipekikan	Menyediakan Cerdang Kamar dan Bangunan Lainnya yang Dipekikan		Sekarang	
31	Penyediaan Kebutuhan Teknik di Bidang Teknologi Wawasan Kelangkaan, Benda Negara, Karakor Bangsa, Penemuan Kelangkaan Benda Tunggal Ika dan Segala Kelangkaan	Jumlah Kebutuhan Teknik di Bidang Teknologi Wawasan Kelangkaan, Benda Negara, Karakor Bangsa, Penemuan Kelangkaan Benda Tunggal Ika dan Segala Kelangkaan yang Dipekikan	Dokumen	1	1	100%			100%	TW I II	Menyediakan Kebutuhan Teknik di Bidang Teknologi Wawasan Kelangkaan, Benda Negara, Karakor Bangsa, Penemuan Kelangkaan Benda Tunggal Ika dan Segala Kelangkaan	Menyediakan Kebutuhan Teknik di Bidang Teknologi Wawasan Kelangkaan, Benda Negara, Karakor Bangsa, Penemuan Kelangkaan Benda Tunggal Ika dan Segala Kelangkaan		Sekarang	

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Target PACU	Realisasi PACU	Persentase PACU	TW	Sasaran Kegiatan	Akhiran	Kendala	Solusi	Pemangku Jawab
41	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pengembangan Demokrasi, Fasilitas Keterbacaan Pemerintahan, Persepsi dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanian Sensus Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pengembangan Demokrasi, Fasilitas Keterbacaan Pemerintahan, Persepsi dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanian Sensus Politik di Daerah	Orang	20	20	100%	Rp 21.167.194.986	Rp 21.167.190.091	99%	1	Terlaksana jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pengembangan Demokrasi, Fasilitas Keterbacaan Pemerintahan, Persepsi dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanian Sensus Politik di Daerah	Melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pengembangan Demokrasi, Fasilitas Keterbacaan Pemerintahan, Persepsi dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanian Sensus Politik di Daerah	Tidak ada		Pelaksana
42	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pengembangan Demokrasi, Fasilitas Keterbacaan Pemerintahan, Persepsi dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanian Sensus Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pengembangan Demokrasi, Fasilitas Keterbacaan Pemerintahan, Persepsi dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanian Sensus Politik di Daerah	Orang	200	200	100%	Rp 137.137.680	Rp 133.100.000	96%	1	Terlaksana jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pengembangan Demokrasi, Fasilitas Keterbacaan Pemerintahan, Persepsi dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanian Sensus Politik di Daerah	Melaksanakan jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pengembangan Demokrasi, Fasilitas Keterbacaan Pemerintahan, Persepsi dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanian Sensus Politik di Daerah	Tidak ada		Pelaksana
43	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pengembangan Demokrasi, Fasilitas Keterbacaan Pemerintahan, Persepsi dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanian Sensus Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pengembangan Demokrasi, Fasilitas Keterbacaan Pemerintahan, Persepsi dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanian Sensus Politik di Daerah	Laporan	1	1	100%	Rp 109.218.520	Rp 105.820.000	97%	1	Terlaksana laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pengembangan Demokrasi, Fasilitas Keterbacaan Pemerintahan, Persepsi dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanian Sensus Politik di Daerah	Melaksanakan Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pengembangan Demokrasi, Fasilitas Keterbacaan Pemerintahan, Persepsi dan Partisipasi Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanian Sensus Politik di Daerah	Tidak ada		Pelaksana
44	Pengawasan Program Kerja di Bidang Pendidikan Umum, Pendidikan dan Cemas, Etika dan Mekanisme Sengaja Cemas, Pengawasan Cemas dan Cemas yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Umum, Pendidikan dan Cemas, Etika dan Mekanisme Sengaja Cemas, Pengawasan Cemas dan Cemas yang Disusun	Dokumen	3		0%				1	Terlaksana jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Umum, Pendidikan dan Cemas, Etika dan Mekanisme Sengaja Cemas, Pengawasan Cemas dan Cemas yang Disusun				Pelaksana

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Prevalensi	Target PACU	Realisasi PACU	Prevalensi PACU	TW	Sasaran Kegiatan	Alat/Biaya	Kendala	Sebab	Peserta/penyaji
45	Pengembangan Sistem Pemantauan Kelangkaan di Bidang Pendidikan Orang Pribertayaan Orang, Kualitas dan Metode Sempurna Orang Pengawasan Orang dan Orang yang di Daerah	Jumlah Kelangkaan di Bidang Pendidikan Orang Pribertayaan Orang, Kualitas dan Metode Sempurna Orang Pengawasan Orang dan Orang yang di Daerah yang Disusun	Dokumen	3						TW I TW II TW III TW IV					
46	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pendidikan Orang Pribertayaan Orang, Kualitas dan Metode Sempurna Orang Pengawasan Orang dan Orang yang di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pendidikan Orang Pribertayaan Orang, Kualitas dan Metode Sempurna Orang Pengawasan Orang dan Orang yang di Daerah	Orang	50						TW I TW II TW III TW IV					
47	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Orang Pribertayaan Orang, Kualitas dan Metode Sempurna Orang Pengawasan Orang dan Orang yang di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Orang Pribertayaan Orang, Kualitas dan Metode Sempurna Orang Pengawasan Orang dan Orang yang di Daerah	Orang	50						TW I TW II TW III TW IV					
48	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Orang Pribertayaan Orang, Kualitas dan Metode Sempurna Orang Pengawasan Orang dan Orang yang di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Orang Pribertayaan Orang, Kualitas dan Metode Sempurna Orang Pengawasan Orang dan Orang yang di Daerah	Laporan	1						TW I TW II TW III TW IV					
49	Pengembangan Program Kerja di Bidang Pendidikan Orang Pribertayaan Orang, Kualitas dan Metode Sempurna Orang Pengawasan Orang dan Orang yang di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Orang Pribertayaan Orang, Kualitas dan Metode Sempurna Orang Pengawasan Orang dan Orang yang di Daerah yang Disusun	Dokumen	1						TW I TW II					

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Rendahnya	Persentase	Target PAU	Rendahnya PAU	Persentase PAU	TW	Sasaran Kegiatan	Aktivitas	Kondisi	Salut	Pemanggang Jawab
50	Persentase Sajian Perencanaan Kegiatan di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kesehatan Lintas Beragama dan Penyelenggaraan Kerjasama di Daerah	Jumlah Kegiatan di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kesehatan Lintas Beragama dan Penyelenggaraan Kerjasama di Daerah yang Disusun	Dokumen	2	100%					TW I TW II TW III TW IV					
51	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kesehatan Lintas Beragama dan Penyelenggaraan Kerjasama di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kesehatan Lintas Beragama dan Penyelenggaraan Kerjasama di Daerah	Orang	50	100%	Rp 62.000.000	Rp 62.000.000	100%		TW I TW II TW III TW IV	Terlaksananya Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kesehatan Lintas Beragama dan Penyelenggaraan Kerjasama di Daerah	Melaksanakan Kegiatan di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kesehatan Lintas Beragama dan Penyelenggaraan Kerjasama di Daerah	Tidak ada		Kendang
52	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kesehatan Lintas Beragama dan Penyelenggaraan Kerjasama di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kesehatan Lintas Beragama dan Penyelenggaraan Kerjasama di Daerah	Orang	100	100%					TW I TW II TW III TW IV	Terlaksananya Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kesehatan Lintas Beragama dan Penyelenggaraan Kerjasama di Daerah				Kendang
53	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kesehatan Lintas Beragama dan Penyelenggaraan Kerjasama di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kesehatan Lintas Beragama dan Penyelenggaraan Kerjasama di Daerah	Laporan	1	100%					TW I TW II TW III					

No	Sifat Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Target PACU	Realisasi PACU	Persentase PACU	TW	Sasaran Kegiatan	Aktivitas	Kendala	Sekolah	Peningkatan
54	Pemenuhan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Interlept, Pemenuhan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perlindungan antar Negara, Fasilitas Keterbacaan Bidang Kewaspadaan, serta Pemanggunan Konflik di Daerah	Jumlah Dukumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Interlept, Pemenuhan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perlindungan antar Negara, Fasilitas Keterbacaan Bidang Kewaspadaan, serta Pemanggunan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	2	2	100%	Rp 11.128.048	Rp 8.177.000	58%	TW I ✓ TW II ✓ TW III ✓ TW IV ✓	Terdokumentasi Dukumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Interlept, Pemenuhan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perlindungan antar Negara, Fasilitas Keterbacaan Bidang Kewaspadaan, serta Pemanggunan Konflik di Daerah yang Disusun	Membuat dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Interlept, Pemenuhan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perlindungan antar Negara, Fasilitas Keterbacaan Bidang Kewaspadaan, serta Pemanggunan Konflik di Daerah yang Disusun	Tidak ada		Kendala
55	Pemenuhan Bidang Pemenuhan Kebutuhan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Interlept, Pemenuhan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perlindungan antar Negara, Fasilitas Keterbacaan Bidang Kewaspadaan, serta Pemanggunan Konflik di Daerah	Jumlah Kebutuhan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Interlept, Pemenuhan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perlindungan antar Negara, Fasilitas Keterbacaan Bidang Kewaspadaan, serta Pemanggunan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	100%				TW I ✓ TW II ✓ TW III ✓ TW IV ✓					Kendala
56	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Interlept, Pemenuhan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perlindungan antar Negara, Fasilitas Keterbacaan Bidang Kewaspadaan, serta Pemanggunan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Interlept, Pemenuhan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perlindungan antar Negara, Fasilitas Keterbacaan Bidang Kewaspadaan, serta Pemanggunan Konflik di Daerah	Orang	100	100	100%	Rp 50.214.908	Rp 47.711.000	95%	TW I ✓ TW II ✓ TW III ✓ TW IV ✓	Terdokumentasi Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Interlept, Pemenuhan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perlindungan antar Negara, Fasilitas Keterbacaan Bidang Kewaspadaan, serta Pemanggunan Konflik di Daerah	Melaksanakan Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Interlept, Pemenuhan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perlindungan antar Negara, Fasilitas Keterbacaan Bidang Kewaspadaan, serta Pemanggunan Konflik di Daerah	tidak ada		Kendala
57	Pelaksanaan Kewaspadaan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Interlept, Pemenuhan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perlindungan antar Negara, Fasilitas Keterbacaan Bidang Kewaspadaan, serta Pemanggunan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Interlept, Pemenuhan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perlindungan antar Negara, Fasilitas Keterbacaan Bidang Kewaspadaan, serta Pemanggunan Konflik di Daerah	Orang	45		100%				TW I ✓ TW II ✓ TW III ✓					Kendala

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Target PACU	Realisasi PACU	Persentase PACU	TW	Sasaran Kegiatan	Aktivitas	Kendala	Subsidi	Pemangku Jawab
38	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Jejaring, Penguatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lulusan Asing, Kewaspadaan Perikanan laut, Vegetasi, Fasilitas Kewaspadaan Hilang Kewaspadaan, serta Penguatan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Jejaring, Penguatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lulusan Asing, Kewaspadaan Perikanan laut, Vegetasi, Fasilitas Kewaspadaan Hilang Kewaspadaan, serta Penguatan Konflik di Daerah	Laporan	1	1	100%				TW I TW II TW III TW IV	1. melaksanakan 1 laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Jejaring, Penguatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lulusan Asing, Kewaspadaan Perikanan laut, Vegetasi, Fasilitas Kewaspadaan Hilang Kewaspadaan, serta Penguatan Konflik di Daerah				Kecamatan
39	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dukungan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota	Dukungan	1	1	100%	Rp 47.629.310	Rp 42.794.000	90%	TW I TW II TW III TW IV	1. melaksanakan Dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota	Menyediakan Dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota	tidak ada kendala		Kecamatan

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan Sasaran, Indikator Sasaran, serta target kinerja dan kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja.

Semoga penyusunan laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja Tahun 2024 ini menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target kinerja tahunan.

Singkawang, 31 Desember 2024
Kepala

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Singkawang



Drs ZULHIAR
NIP. 19681223 1989081 001

BADAN KESBANGPOL



KOTA SINGKAWANG